agr UMY

JURNAL ILMU-ILMU PERTANIAN ISSN : 0854-4026

Isolasi, Karakterisasi Dan Aplikasi Isolat Jamur Dan Bakteri Pendegradasi Sampah Organik Pasar
❑ Hariyono, Nike Triwahyuningsih, Mamik Susanti

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Petani Bawang Merah Di Kabupaten Bantul
❑ Francy Risvansuna

Evaluasi Keberhasilan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Di Kabupaten Bantul
❑ Lestari Rahayu

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Mengikuti Kemitraan Pada Usahatani Cabai Merah Keriting Di Kecamatan Pakem Kabupaten Slema
❑ Nur Rahmawati

Persentase Penggunaan Pupuk Anorganik Dan Saat Panen Pengaruhnya Terhadap Kuantitas Dan Kualitas Benih Kedelai
❑ Sarjiyah

Penanaman Sawi (*Brassica Sinensis L.*) Sistem Hidroponik Pada Berbagai Macam Media Tanam
❑ Titiek Widyastuti, Bambang Heri Isnawan, Roby Jazuli

Vol. XVII, No. 2, Desember 2008

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

REDAKSI

Gunawan Budiyanto

Siti Yusi Rusimah

Lestari Rahayu

Triyono

Eni Istiyanti

Diterbitkan oleh :

Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Alamat : Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan Bantul Yogyakarta 55183
Telp. (0274) 387656 (hunting) Fax. (0274) 387646
e-mail : goenb@umy.ac.id

AgrUMY merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan dua kali setahun sebagai media komunikasi guna memberikan informasi hasil penelitian dan studi pustaka bidang pertanian.

Redaksi menerima naskah baik berupa hasil penelitian maupun studi pustaka yang diketik komputer MS-Word dengan jarak 1 spasi dan panjang tulisan antara 8 - 12 halaman kuarto, tebal dan gambar menjadi bagian tidak terpisahkan dari naskah dengan jarak 1 spasi tanpa garis vertikal.

Naskah disampaikan dalam bentuk disket dan hasil cetakan (print-out)
Aturan lebih rinci dapat disimak dihalaman terakhir jurnal ini.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

DAFTAR ISI

Isolasi, Karakterisasi Dan Aplikasi Isolat Jamur Dan Bakteri Pendegradasi Sampah Organik Pasar
- Hariyono, Nike Triwahyuningsih, Mamik Susanti..... 61 - 72

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Petani Bawang Merah Di Kabupaten Bantul
- Francy Risvansuna..... 73 - 85

Evaluasi Keberhasilan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Di Kabupaten Bantul
- Lestari Rahayu..... 86 - 97

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Mengikuti Kemitraan Pada Usahatani Cabai Merah Keriting Di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman
- Nur Rahmawati..... 98 - 109

Persentase Penggunaan Pupuk Anorganik Dan Saat Panen Pengaruhnya Terhadap Kuantitas Dan Kualitas Benih Kedelai
- Sarjiyah..... 110 - 121

Penanaman Sawi (*Brassica Sinensis L.*) Sistem Hidroponik Pada Berbagai Macam Media Tanam
- Titick Widyastuti, Bambang Heri Isnawan, Roby Jazuli..... 122 - 128

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

EVALUASI KEBERHASILAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP) DI KABUPATEN BANTUL

The Success Evaluation of Program Coastal Community Economic Empowerment (PEMP) in Bantul

Lestari Rahayu
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian UMY
Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto,
Kasihan, Bantul, Yogyakarta

ABSTRACT

In an effort to optimize the potential of coastal areas through increased access to capital, the government developed a program of Coastal Community Economic Empowerment (PEMP). Research conducted in the village of Parangtritis, Kretek sub-district, Bantul regency is intended to evaluate how far the program successfully in reaching the goals. Data were collected by interview with the program managers of PEMP, the staff of Marine and Fisheries Agency, the staff of assistant's village (TPD) as informants; and 40 samples of program participants that were drawn at random. The results showed, PEMP program succeeded in increasing the participation of a member cooperative society, improve the status of LEPP-M3 (Institute for Economic Development of Coastal Micro-Partners-Mina) into a cooperative legal entity, and improve the financial performance of cooperatives. Changes the mechanism of channeling funds through the group with joint responsibility into the banking system with individual customer approach, effectively suppressed the credit jam and educate coastal communities with banking rules (bankable). The community considers that the banking system approach has a simple procedure, the low interest rates, the time for faster disbursement of funds; and the amount of funds received and payment system were flexible. Therefore the community use most of the funds received for the business activity. As an impact, the average of incomes increased by 20% after the program. However, the activity of assistants in conducting coaching at the community is still limited at the time of proposal drafting. In fact, participants still need assistance in monitoring and utilization of funds.

Keywords: *PEMP program, institution, fund distribution*

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir dan laut memiliki arti strategis dengan potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang terkandung didalamnya Potensi perikanan laut meliputi perikanan tangkap, budidaya laut dan industri bioteknologi kelautan merupakan asset yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun asset ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi perikanan tangkap Indonesia diperkirakan mencapai 6,28 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,01 juta ton atau 80% dari MSY (*Maximum Sustainable Yield*). Jumlah tangkapan hingga saat ini mencapai 3,50 juta ton sehingga tersisa peluang sebesar 1,50 juta ton/tahun. Potensi perikanan tangkap tersebut diperkirakan memiliki nilai ekonomi US$15,10 milyar (Departemen Kelautan dan Perikanan 2003). Oleh karena itu seharusnya masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang sejahtera, mengingat sumber daya alam yang besar tersebut. Namun pada kenyataannya hingga saat ini sebagian besar masyarakat pesisir, terutama nelayan masih merupakan bagian dari masyarakat yang tertinggal dibandingkan dengan masyarakat lain. Menurut Data BPS (2002) jumlah desa pesisir 8.090 desa dengan *poverty head count index* (PHI) 0,3214 atau 32,14 % masyarakat pesisir masih hidup di garis kemiskinan. Kemiskinan masyarakat pesisir berakar pada keterbatasan akses permodalan dan kultur kewirausahaan yang tidak kondusif lemahnya infrastruktur kelembagaan sosial ekonomi masyarakat di tingkat desa

Untuk mengatasi kesulitan ini yang akan berakibat jatuhnya bahaya kemiskinan sepanjang pesisir pantai maka pemerintah perlu membuat program pemberdayaan masyarakat pesisir yang dirancang sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya. Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah bersifat *bottom up* dan *open menu*, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran. Persoalan yang mungkin harus dijawab adalah: Bagaimana memberdayakannya?

Banyak sudah program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP). Pada intinya program ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan kelembagaan, pendampingan dan dana usaha produktif bergulir.

(a) **Kelembagaan.** Bahwa untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, mereka haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh, sehingga segala aspirasi dan tuntutan mereka dapat disalurkan secara baik. Kelembagaan ini juga dapat menjadi penghubung (*intermediate*) antara pemerintah dan swasta. Selain itu kelembagaan ini juga dapat menjadi suatu forum untuk menjamin terjadinya perguliran dana produktif diantara kelompok lainnya.

(b) **Pendampingan.** Keberadaan pendamping memang dirasakan sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum dapat berjalan sendiri mungkin karena kekurangtauan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

paradigma-paradigma pembangunan masa lalu. Terlepas dari itu semua, peran pendamping sangatlah vital terutama mendampingi masyarakat menjalankan aktivitas usahanya. Namun yang terpenting dari pendampingan ini adalah menempatkan orang yang tepat pada kelompok yang tepat pula.

(c) **Dana Usaha Produktif Bergulir.** Pada program PEMP juga disediakan dana ekonomi produktif (DEP) untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang menjadi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Setelah kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkannya. Pengaturan pergulirannya akan disepakati di dalam forum atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan tenaga pendamping (Syarief E, 2003)

Masyarakat pesisir Bantul merupakan masyarakat transisi yang bergerak dari masyarakat agraris menuju masyarakat nelayan, Banyak kesulitan yang ditemui masyarakat pesisir pantai Bantul yang berprofesi sebagai nelayan baru. Hal ini dtunjukkan volume dan nilai usaha yang kecil, manajemen usaha yang kurang baik dan para pelaku ekonomi yang tingkat pendidikannya relatif rendah. Salah satu kesulitannya adalah akses modal. Modal usaha sangat diperlukan dalam bidang penangkapan ikan, hal ini tercermin bahwa usaha perikanan laut tergolong padat modal dan beresiko tinggi. Siapa yang bermodal kuat akan menguasai sumberdaya ikan secara berlebih dan sisanya yang kecil-kecil merupakan bagian mereka yang miskin serta masih akan terbagi-bagi lagi. Untuk mengatasi masalah permodalan dan ketimpangan pendapatan maka pada tahun 2001 dikucurkan Dana Ekonomi Produktif melalui Proyek PEMP.

Indikator keberhasilan program PEMP di Kabupaten Bantul dalam jangka pendek antara lain (a) tersosialisasikan Program PEMP kepada masyarakat dan pihak terkait; (b) tersalurkannya DEP masyarakat secara tepat jumlah, waktu, dan sasaran sesuai dengan usulan kegiatan yang disetujui; (c) berjalannya pembinaan dan pengawasan kegiatan PEMP; (d) berfungsinya operasional Kelembagaan Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro-Mitra-Mina (LEPP-M3) USP. Sedangkan dalam jangka panjang tolok ukur keberhasilan program PEMP adalah adalah (a) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir sasaran program melalui pengembangan usaha produktif; (b) mandirinya koperasi LEPP-M3 secara profesional sebagai lembaga ekonomi masyarakat pesisir; (c) terbentuknya mekanisme hubungan saling menguntungkan antara LEPP-M3, Bank Bukopin, Pemerintah dengan masyarakat pesisir secara alamiah sehingga terwujud masyarakat pesisir yang mandiri dalam kebersamaan.; (d) berkembangnya sektor kelautan dan perikanan di Kabuupaten Bantul yang didukung oleh meningkatnya kemajuan SDM,/nelayan/masyarakat pesisir, sarana prasarana kegiatan usaha yang relatif memadai; (e) berkembangnya lembaga keuangan masyarakat pesisir yang secara tidak langsung membiasakan masyarakat pesisir dengan aturan perbankan; (f) tingginya aliran tambahan permodalan bagi Swamitra Mina dari perbankan. (Dinas Perikanan dan Kelautan Bantul, 2004).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Sebagaimana program bantuan kredit dari pemerintah pada umumunya seperti kredit Bimas pada tahun 1972, kemudian menyusul kredit program lainnya seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal KerjaPermanen (KMKP), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani/Nelayan Kecil (P4K), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Ketahanan Pangan (KKP), program Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dan DEP melalui program PEMP di lapangan rawan terhadap penyimpangan (Ashari 2006). Bentuk penyimpangan yang sering ditemukan adalah modal yang diberikan dalam bentuk pinjaman lunak tidak semuanya dialokasikan untuk penguatan modal usaha. Akibatnya program tidak berdampak pada peningkatan pendapatan sehingga pengembalian kreditpun akan mengalami kemacetan. Penyimpangan ini tidak lepas dari bagaimana mekanisme pelaksanaan program diikuti oleh pihak-phak yang terlibat dalam penyaluran dan pengelolaan dana.

Studi ini menggambarkan pelaksanaan program PEMP dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauhmana program dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dan berhasil sesuai dengan indikator keberhasilan PEMP yang telah ditetapkan dan bagaimana masyarakat pesisir memanfaatkan program tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pelaksanaan menggunakan metode survei, yaitu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematik, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir 2003). Penelitian dilakukan di desa Parangtritis Kecamatan Kretek dengan pertimbangan kecamatan ini memiliki Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) paling banyak. Informan diambil dari pengelola program PEMP (LEPP-M3), staff Dinas Kelautan dan Perikanan, Tenaga pendamping desa (TPD) dan penerima bantuan program sebanyak 40 sampel yang diambil secara random. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*depth interview*) langsung pada para informan. Data sekunder dikumpulkan dengan cara memanfaatkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diambil dari pihak-pihak yang terkait. Untuk mengetahui persepsi masyrakat pesisir terhadap program PEMP dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik penskoran, dan selanjutnya data dibagi dalam 3 kategori yaitu:

1,00 - 1,99 = Prorgam PEMP tidak sesuai

2,00 - 2,99 = Program PEMP cukup sesuai

3,00 - 4,00 = program PEMP sesuai

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kelembagaan PEMP di Kabupaten Bantul. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyrakat Pesisir (PEMP) secara umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan pengembangan kultur kewirausahaan, penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan pemberdayaan serta diversifikasi usaha yang berkelanjutan dan berbasis sumberdaya lokal. Sasaran program PEMP adalah: (i) Koperasi sebagai sasaran antara dan (ii) sasaran akhir yaitu masyarakat

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

pesisir yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung menurut skala prioritas dengan usaha skala mikro dan kecil yang berorientasi pada sektor usaha kelautan dan perikanan seperti kegiatan penangkapan, budidaya, perniagaan hasil perikanan, pengolahan ikan, usaha jasa perikanan serta usaha penunjuang lainnya yang beralokasi didaerah sekitar pesisir.

Program PEMP dirancang untuk tiga periode Perode pertama, 2001-2003 merupakan periode inisiasi dengan fokus pada penggalangan partisipasi dan penyadaran masyarakat serta perintisan kelembagaan yang diharapkan sebagai cikal bakal *holding company* yang akan memayungi aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Periode kedua yang berlangsung dari 2004-2006 merupakan periode instutisionalisasi . Dalam kurun waktu tiga tahun periode ini program akan difokuskan pada revitalisasi kelembagaan melalui peningkatan status LEPP-M3 yang berbadan hukum koperasi. Periode ketiga merupakan periode diversifikasi usaha yang rencananya dimulai pada tahun 2007-2009. Pada periode ini dibentuk unit-unit usaha yang bernaung dibawah LEPP-M3 yang telah berbadan hukum koperasi. (Departemen Kelautan dan Perikanan 2007)

Secara umum program PEMP 2001-2006 Kabupaten Bantul dapat dikatakan berhasil baik pada periode inisiasi maupun periode institusionalisasi ditinjau dari tersosialisasinya program dan terbentuknya lembaga-lembaga, tersalurkannya dana ekonomi produktif, peningkatan jumlah dana dan kelompok sasaran. Walapun belum semua masyarakat pesisir di Kabupaten Bantul menjadi kelompok masyarakat pemanfaat koperasi namun dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 terus mengalami peningkatan jumlah anggota koperasi (Tabel 1) Hal ini menunjukkan adanya partisipasi masyarakat pesisir yang besar terhadap kelembagaan koperasi. Jumlah kelompok masyarakat pemanfaat terbanyak berasal dari pedagang/bakul karena semkin meningkatnya jumlah tangkapan ikan dan kualitas ikan yang didaratkan apalagi belakangan ini banyak pembeli dari Jawa Tengah yang langsung ke TPI (Tempat pelelangan ikan). sehingga banyak pedagang ingin menambah modal untuk meningkatkan omset penjualan agar memperoleh tambahan penghasilan. Kredit yang diambil pedagang berkisar antara Rp 1.500.000,- sampai Rp 5.000.000,-

Pada periode institusionalisasi program PEMP bisa dilihat dari profil Koperasi sekunder LEPP-M3 Kabupaten Bantul (LKM Swamitra USP) yang sudah berbadan hukum koperasi : 028/ BH/IX/2003. Profil kinerja keuangan LKM dalam hal asset, penyaluran kredit serta mobilisasi dana simpanan yang terus mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2, . Disamping itu Koperasi Sekunder LEPP M3 berprestasi sebagai Swamitra Mina terbaik ke-3 seluruh Indonesia. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan, karena salah satu faktor kegagalan atau ketidakberlanjutan kredit program pemerintah adalah rendahnya kinerja lembaga keuangan. Menurut Martowijoyo (2002), lemahnya kinerja lembaga keuangan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: (1) rendahnya tingkat pelunasan kredit; (2) rendahnya moralitas aparat pelaksana, dan (3) rendahnya tingkat mobilisasi dana masyarakat.. Kelemahan tersebut membawa konsekuensi pada tidak berlanjutnya (*unsustainable*) lembaga keuangan yang terbentuk setelah program selesai. Akibatnya, peserta program umumnya

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Tabel 1. Kelompok masyarakat Pemanfaat Tahun 2001-2006

Kelompok Pemanfaat	Jumlah (orang)					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. Nelayan	20	52	46	40	20	13
2. Pembudidaya	0	0	62	66	73	64
3. Pengolah	12	12	11	18	9	5
4. Pedagang/Bakul	19	19	28	40	52	111
5. Jasa wisata bahari	0	0	1	12	6	41
6. Masyarakat pesisir lainnya	0	0	0	4	15	39
Jumlah	51	83	148	181	175	273

Koperasi Swamitra Mina USP Kabupaten Bantul (2007)

Tabel 2. Profil Lembaga Keuangan Mikro Swamitra Mina Kabupaten Bantul

Tahun	Asset (000,-)	Posisi Kredit		Posisi Simpanan		Modal Tidak Tetap
		Nasabah	Total (000,-)	Nasabah	Rp (000,-)	Rp (000,-)
2004	953.917	31	191.500	33	22.495	179.898
2005	1.702.126	175	932.558	208	349.959	624.500
2006	2.956.746	273	1.685.865	352	441.792	1.116.246

Koperasi Swamitra Mina USP Kabupaten Bantul (2007)

akan kembali mengalami kekurangan modal usaha. Menurut Krisnamurti (2005), pengembangan kapasitas kelembagaan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendamping, dunia usaha, lembaga internasional, kerjasama antar LKM dan instansi pemerintah. Kerjasama dapat dilakukan terutama dalam peningkatan kemampuan SDM, sistem dan prosedur operasi, teknologi, jaringan usaha, dan aksesibilitas terhadap berbagai dukungan dalam meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Penyaluran Dana Ekonomi Produktif dan Pendampingan. Berdasarkan pedoman umum PEMP 2007 dana ekonomi produktif (DEP) dialokasikan untuk penjaminan tunai (*cash collateral*) dan bantuan sarana diversifikasi usaha oleh koperasi antara lain pengembangan SPDN (*solar packed dealer* untuk Nelayan), kedai Pesisir, sarana penangkapan ikan, sarana pengolahan ikan dan sarana pemasaran ikan. Sampai saat ini DEP yang disalurkan di Kabupaten Bantul masih terbatas penggunaan jaminan tunai (*cash collateral*). Dalam hal ini DEP digunakan sebagai jaminan koperasi untuk meminjam dana dari Bukopin Yogykarta yang akan dipnjamkan kepada masyarakat pesisir.

Pada awalnya yaitu pada tahun 2001-2003, DEP disalurkan kepada masyarakat pesisir melalui kelompok dengan sistem tanggung renteng. Harapan menumbuhkan tanggung jawab bersama, rasa saling percaya dan kebersamaan sehingga dana cepat bergulir. Namun kenyataannya terjadi kemacetan yang mencapai hampir 80 % Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat pesisir, menganggap

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

program PEMP lewat stimulan DEP, merupakan bantuan hibah murni yang tidak perlu dikembalikan. Disamping itu dana disalurkan melalui kelompok bentukan baru dengan kinerja manajemen kelompok yang belum baik. Penyaluran kredit lewat kelompok akan bejalan baik apabila kelompok merupakan kelompok yang sudah berpengalaman paling tidak tiga tahun dan mempunyai kas (Rahayu dan Risvansuna, 2006)

Berdasarkan hasil evaluasi maka pada tahun 2004-2006, penyaluran dana melalui Swamitra Mina diubah dengan pendekatan sistem perbankan dan nasabah individu. Menurut Tukiran dkk (2003); Chotim dan Thamrin (1997), pendekatan individu atau perorangan lebih efektif dan lebih efisien dibanding pendekatan kelompok karena ada komitmen yang tinggi dari nasabah individu sehingga tingkat kemacetan dapat ditekan Hal ini terbukti dari turunnya tingkat kemacetan kredit pada tahun 2006 menjadi 1,01 %, dan kemacetan ini dikarenakan adanya gempa, sehingga masyrakat banyak menggunakan dana tersebut untuk membangun rumah yang rusak.

Disamping dapat menurunkan tingkat kemacetan kredit, perubahan sistem penyaluran dana dari sistem nasabah kelompok menjadi sistem nasabah individu secara umum dapat diterima oleh masyarakat pesisir. Hal ini ditunjukkan dari persepsi terhadap program PEMP. Masyrakat pesisir akan memberikan penilaian yang positif, apabila program PEMP dapat memberikan keuntungan atau berpengaruh positif bagi masyrakat itu sendiri serta kesesuaian pelaksanaan program dengan kemampuan masyrakat pesisir. Untuk skor indikator persepsi nelayan terhadap program dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa rata-rata skor persepsi responden terhadap kredit adalah baik. Ini menunjukkan bahwa kredit yang mereka terima sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Walaupun dalam prosedur pengajuan mendapatkan kredit, calon nasabah harus mentaati ketentuan yang ada seperti bank konvenasional, responden mempunyai persepsi prosedur yang dilalui untuk mendapatkan kredit ini sederhana. Hal ini karena responden menganggap bahwa meminjam uang melalui koperasi Swamitra Mina lebih mudah bila dibanding meminjam sendiri ke bank. Selain itu dengan adanya bimbingan yang dilakukan oleh TPD mereka menganggap mendapat tambahan pengetahuan baru.

Beberapa responden berpersepsi bahwa persyaratan yang diajukan dalam proyek PEMP agak sulit. Terutama dalam hal keharusan setiap nasabah memberikan jaminan dalam bentuk surat-surat atau bukti kepemilikan barang berharga. Keharusan menyerahkan jaminan tersebut dimaksudkan agar nelayan termotivasi untuk mengembalikan kredit yang dipinjam. Dengan termotivasi harus mengembalikan kredit yang dipinjam diharapkan nelayan akan sungguh-sungguh dalam mengelola usahanya. Masalah jaminan kredit menjadi kendala bagi anggota masyarakat pesisir yang berpendapatan kecil. .

Waktu pencairan dan realisasi kredit yang diterima oleh responden mempunyai persepsi katagori skor yang tinggi. Mereka menganggap besarnya kredit yang diterima sudah sesuai yang diajukan, 88,8% kredit yang diajukan terealisasi. Besarnya modal yang diterima bervariasi ada dengan kredit terendah Rp 1.500.000 dan tertinggi Rp 25.000.000,- dengan rata-rata Rp 7.000.000,-. waktu pencairan kredit 3-7 hari setelah

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Tabel 3. Rata-rata skor persepsi responden terhadap kredit DEP

Permodalan	Kisaran skor	Agregat	% skor
Prosedur pengajuan	1-4	3,47	86,75
Persyaratan	1-4	2,90	72,5
Realisasi kredit	1-4	3,41	85,25
Waktu pencairan	1-4	3,12	78
Angsuran	1-4	2,94	73,5
Tingkat bunga	1-4	3,02	75,5
Rata –rata		3,14	78,5
Katagori		baik	

pengajuan. Persepsi responden terhadap lamanya waktu pencairan sudah sesuai. Hal ini karena responden menganggap waktu pencairan tidak terlalu lama jika dibandingkan meminjam di bank yang membutuhkan waktu sampai 2 bulan hingga dana tersebut turun.

Angsuran adalah besarnya uang yang harus dikembalikan oleh responden yang dipinjam untuk membiayai usahanya. Mekanisme angusran berbeda-beda tergantung jenis kredit yang diajukan.: (i) Investasi, Jangka waktu pengembalian 3 tahun, angsuran pinjaman diangsur tiap kali melaut dengan ketentuan 50 % untuk KMP, 15 % untuk biaya perawatan perahu dan jaring, 35 % untuk angsuran ke LEPP-M3, (ii) Penguatan modal alat tangkap, usaha dagang dan warung makan. Jangka waktu pengembalian 2 tahun, angsran pokok dan jasa diangsur tiap bulan, (iii) Usaha budidaya Jangka waktu pengembalian 2 tahun, angsuran pokok diangsur 8 kali per 3 bulanan sebesar 12,5 % dari jumlah pinjaman, sedang jasa pinjaman diangsur tiap balun. Sebagian besar responden mengatakan sesuai dengan mekanisme angsuran yang digunakan., ada beberapa responden mengatakan mekanisme angsuran agak berat, ini terjadi pada responden yang mengalami kerugian usaha atau nelayan yang tidak bisa melaut karena cuaca..

Sebagian besar responden mengatakan bahwa bunga rendah merupakan faktor utama mengambil kredit, bunga yang dibebankan sebesar 14 % - 18 % per tahun Persepsi responden terhadap besarnya tingkat bunga yang dibebankan oleh mereka adalah ringan. Hal ini terkait dengan pengalaman mereka ketika meminjam uang sendiri ke bank (22-24%/tahun).

Pengembalian kredit disini dilihat dari besarnya kredit yang sudah dikembalikan, ketepatan waktu pengembalian, ketepatan jumlah pengembalian. Hampir seluruh masyarakat pesisir (99 %) mampu mengembalikan jumlah pinjaman walaupun tidak tepat waktu. Hal ini karena terkait dengan rasa tanggung jawab dari responden untuk mengembalikan serta adanya anggapan bahwa jika mereka tidak membayar maka nantinya mereka tidak dapat mengakses kredit kembali. Namun jumlah kredit sangat mempengaruhi ketepatan waktu pengembalian, semakin besar kredit yang diambil semakin tidak tepat waktu pengembaliannya. Semakin banyak kredit yang diambil semakin banyak yang belum melunasi sehingga perlu dipikirkan jumlah kredit yang diambil agar disesuaikan dengan kemampuan nelayan yaitu tidak lebih dari 10 juta rupiah

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Salah satu kekuatan dari kredit program pemerintah adalah adanya pendampingan terhadap usaha dan pengelolaan pinjaman. Pada program PEMP, yang melakukan pendampingan dinamakan Tenga Pendampngan Desa (TPD). Tugas TPD adalah: i) membuat perencanaan pendampingan masyarakat; ii) mempersiapkan masyarakat pesisir untuk mengkases kredit pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM); (iii) membantu masyarakat pesisir dalam menyusun proposal kegiatan usaha; (iv) mendampingi masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan usaha baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Keberadaan pendamping memang dirasakan sangat dibutuhkan, 80% responden menyatakan sangat membutuhkan pendamping untuk keberlanjutan usaha. Pembinaan dan pendampingan program PEMP dilakukan agar usaha masyarakat pesisir memperoleh hasil yang optimal dengan harapan kredit dapat dikembalikan oleh masyarakat pesisir tepat pada waktunya sebagai hasil kesuksesan. Proses pembimbingan dan pendampingan dapat dikatakan baik hanya pada saat awal program PEMP berlangsung yaitu dalam pedampingan pembuatan proposal. Kehadiran penyuluh untuk memberikan bimbingan tidak rutin. Penyuluh biasanya memberikan penyuluhan pada saat kelompok tersebut dalam masalah atau pada saat kelompok tersebut akan mengakses kredit. Sedangkan untuk keberlanjutan usaha, masyarakat pesisir masih merasakan belum cukup mendapatkan pembimbingan dan materi yang diberikan belum sesuai yang diinginkan masyarakat.

Pemanfaatan Dana Ekonomi Produktif. Efektivitas pemanfaatan kredit oleh responden dilihat dari peruntukan kredit apakah digunakan untuk usaha atau tidak serta besarnya kredit yang sudah dimanfaatkan serta manfaat yang diperoleh dari kredit DEP apakah dapat meningkatkan pendapatan. Pemanfaatan kredit seringkali tidak sesuai, tidak jarang responden menggunakan kredit yang seharusnya untuk usaha akhirnya digunakan untuk konsumsi. Kebutuhan hidup yang beragam menyebabkan pengalokasian kredit yang tidak efektif. Tetapi dari sebagian mereka ada yang memanfaatkan kredit tersebut benar-benar untuk usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50 % responden memanfaatkan dana yang didapat 100% digunakan untuk usaha, 40 % responden memanfaatkan 70-90% dana yang didapat digunakan untuk usaha, 10 % reponden hanya memanfaatkan 20-25% dana untuk usaha.

Pengalokasian kredit yang yang tidak sesuai dengan tujuan pengambilannya akhirnya menyebabkan manfaat yang didapat dari mengikuti program PEMP ini tidak tercapai. Namun demikian 87,5

Tabel 4 . Perkembangan usaha setelah adanya program PMEP

Uraian	Penambahan
Frekuensi melaut	3-5 trip
Armada & Alat Tangkap	1-5 unit
ABK	1-2 orang
Panjang jaring	5-10meter
Produksi	10-30 kg
Modal	1jt -20 jt rupiah

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

persen mengatakan bahwa dengan adanya program PEMP ada perkembangan usaha

Berdasarkan tabel 4 setelah adanya program PEMP sarana alat tangkap yang dimiliki nelayan bertambah. Hal ini menjadikan peningkatan animo masyarakat pesisir nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan di laut yang akhirnya akan meningkatkan produksi dan pendapatan... Rata-rata pendapatan yang diperoleh nelayan sebesar Rp 1.792.530,-/kapita/bulan. Hal ini diperkuat dari hasil penelitan Subagiyo dkk (2003) usaha perikanan mampu meningkatkan rata-rata pendapatan petani/nelayan sekali melaut (satu trip) bisa diperoleh Rp 132.716 untuk nelayan ABK dan Rp 362.433 untuk nelayan pemilik. Apabila dalam satu bulan rata-rata melaut 17 kali, maka pendapatan para petani/nelayan masing-masing sebesar Rp2.256.183 dan Rp 4.512.366.). Begitu juga untuk masyarakat pesisir lainnya seperti pedagang, pengolah (warung makan), dan pembudidaya yang pengambilan DEP digunakan untuk penguatan modal kerja ternyata dapat meningkatkan pendapatan sebesar 10-20%. Pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 1.170.357,-/kapita/bulan untuk pedagang, Rp 1.307.013/kapita/bulan untuk pengolah dan Rp 919.166,-/kapita/bulan untuk pembudidaya lele dumbo. Keadaan ini juga bisa dilihat pada Tabel 5 dari hasil pendataan koperasi swamitra mina.

Hasil penelitan yang menunjukkan bahwa dengan mengikuti program PEMP, pendapatan masyarakat pesisir naik 20%. Pada tahun 2001 pendapatan masyarakat pesisir sebelum mengikuti program PEMP sebesar Rp 300.000/kapita/bulan dibawah upah minimum provinsi (UMP) DIY sebesar Rp 360.500,-, artinya pendapatan masyarakat pesisir pada saat itu sangat rendah karena untuk memenuhi kebutuhan minimumnya saja tidak tercapai. Dengan terus berjalannya waktu pada tahun 2006 setelah mengikuti program PEMP pendapatan masyarakat pesisir naik menjadi Rp 900.000,-/kapita/bulan diatas upah minimum provinsi DIY sebesar Rp 460.000,- dan pantai selatan (Parangtritis) telah menjadi daerah perikanan tangkap yang paling maju di Kabupaten Bantul. Kegiatan usaha perikanan juga ditunjang oleh kegiatan pariwisata Parangtritis telah menghasilkan terjadinya peningkatan status sosial ekonomi masyarakat dengan adanya perubahan perumahan (tempat tinggal) para nelayan, dari semi permanen menjadi permanen dengan lantai keramik. Hal ini menunjukkan secara tidak langsung program PEMP berhasil meningkatkan kegiatan

Tabel 5. Pendapatan anggota koperasi rata-rata per bulan/orang (rupiah)

Tahun	Pendapatan rata-rata anggota koperasi	
	Sebelum menjadi anggota	Setelah menjadi anggota
2001	300.000	345.000
2002	375.000	431.250
2003	450.000	517.500
2004	525.000	630.000
2005	600.000	720.000
2006	750.000	900.000

Koperasi Swamitra Mina USP Kabupaten Bantul (2007)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

usaha ekonomi produktif masyarakat pesisir, yang berindikasi akan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir.

KESIMPULAN

Secara kelembagaan program PEMP di Kabupaten Bantul dapat dikatakan berhasil dilihat dari semakin meningkatnya jumlah anggota masyarakat pesisir yang menjadi anggota koperasi dari periode inisiasi (2001-2003) sampai periode institusionalisasi (2004-2006), peningkatan LEPP-M3 menjadi koperasi sekunder LEPP-M3 Swamitra mina yang berbadan hukum koperasi, kinerja keuangan koperasi LEPP-M3 Swamitra mina dalam hal asset, penyaluran kredit serta mobilisasi dana simpanan yang terus mengalami peningkatan

Perubahan mekanisme penyaluran dana langsung melalui kelompok dengan sistem tanggung renteng menjadi pendekatan sistem perbankan dengan nasabah individu, efektif menekan tingkat kemacetan kredit dari 80 % pada tahun 2001 menjadi 1,01 % pada tahun 2006. Mekanisme penyaluran dana ekonomi produktif (DEP) program PEMP dengan pendekatan sistem perbankan dengan nasabah individu secara tidak langsung mendidik atau membiasakan masyarakat pesisir dengan aturan perbankan (*bankable*). Persepsi masyarakat pesisir terhadap mekanisme penyaluran DEP termasuk kategori baik, berarti sudah sesuai dengan keinginan masyarakat pesisir yaitu prosedur sederhana, bunga rendah, waktu pencairan cepat, jumlah dana yang diterima sesuai kebutuhan dan sistem angsuran yang fleksibel sesuai dengan usaha . . Namun ada beberapa persyaratan yang tidak sesuai dengan masyarakat pesisir yang memiliki keterbatasan pendapatan yaitu harus menyertakan jaminan berupa sertifikat tanah atau Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau surat berharga lainnya

Keberadaan pendamping sangat dibutuhkan oleh masyarakat pesisir, 80% masyarakat masih membutuhkan pembimbingan dan pembinaan secara kontinyu dan berkelanjutan. . Keberadaan pendamping dirasakan masyarakat pesisir belum tercukupi terutama dalam pembinaan lanjutan yaitu pasca pemberian dana dan monitoring yang berkelanjutan. Proses pembimbingan dan pendampingan dapat dikatakan baik hanya pada saat awal program PEMP berlangsung yaitu dalam pedampingan pembuatan proposal.

Pemanfaatan dana dapat dikatagorikan baik karena pada umumnya masyarakat pesisir sudah memanfaatkan seluruh dana yang diterima dan sebagian besar untuk usaha. Rata-rata pendapatan masyarakat pesisir setelah mengikuti program PEMP meningkat 10-20%, dengan pendapatan untuk nelayan Rp1.792.530/kapita/bulan, pedagang diperoleh sebesar Rp 1.170.357,-/kapita/bulan, pengolah Rp 1.307.013/kapita/bulan dan Rp 919.166,-/kapita/bulan untuk pembudidaya lele dumbo

Untuk pengembangan kapasitas kelembagaan dalam upaya diversifikasi usaha maka perlu adanya jaringan kemitraaan usaha antara masyarakat pesisir dengan pengusaha, perbankan dan perguruan tinggi. Kerjasama dapat dilakukan terutama dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM), sistem dan prosedur operasi, teknologi, jaringan usaha, dan aksesibilitas terhadap berbagai dukungan dalam meningkatkan jangkauan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyaluran dana perlu prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel yang disesuaikan dengan *cash flow* peminjam agar seluruh lapisan masyarakat pesisir terlayani

DAFTAR PUSTAKA

Ashari . 2006. Potensi Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya *Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 4 No. 2, Juni 2006 : 146-164*

Chotim; Ernawati dan Thamrin, J. 1997. *Pemberdayaan dan Replikasi Aspek Finnsial Usaha Kecil di Indonesia.* Akatiga, Bandung

Departemen Kelautan dan Perikanan 2007, *Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.*

Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. 2004. *Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Bantul*

Krishnamurti, B. 2005. Pengembangan Keuangan Mikro bagi Pembangunan Indonesia *Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat. Edisi IV Maret 2005*

Martowijoyo, S. 2002. Dampak Pemberlakukan Sistem Bank Perkreditan Rakyat terhadap Kinerja Lembaga Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Rakyat, Th 1, No. 5, Juli 2002.*

Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian.* Ghalia Indonesia. Jakarta.

Rahayu, L. dan Risvansuna, F. 2006. *Kefektifan Pemenfaatan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Usahatani Bawang Merah di Kabupaten Bantul.* Laporan Penelitian Hibah PHK A-2. Jurusan Sosial EkonomiPertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Subagiyo, Rusidi dan R. Sekarningsih. 2005. Kajian Faktor-faktor Sosial yang Berpengaruh terhadap Adopsi Inovasi Usaha Perikanan Laut di Desa Pantai Selatan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Vol. 8, No.2, Juli 2005 : 300-312*

Syarief, E. 2003. *Pembangunan Kelautan dalam Konteks Pemberdayaan Masyrakat Pesisir.* Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Tukiran; Hardyastuti, S dan Nuh, M. 2002. Problematika Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin : Kasus Kredit Pundi di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Buletin Penelitian Kebijakan Kependudukan Populasi. Volume 13 No.1 Tahun 2002*

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional